

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah pusat. Wisata merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang maupun secara berkelompok yang mengunjungi tempat tertentu yang ditujukan untuk rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari suatu daerah yang mempunyai keunikan potensi yang nantinya akan di kunjungi oleh wisatawan dalam waktu sementara.

Masyarakat desa pada umumnya sebagian besar dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Pemenuhan akan kebutuhan mereka pun rasanya masih sulit untuk terpenuhi. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari pembangunan bagian kecilnya sekalipun, yaitu desa.

Kemajuan perekonomian desa-desa dan semua wilayah atau dengan kata lain pemerataan kemajuan ekonomi merupakan target penting dalam pembangunan ekonomi negara. Sejak masa sebelum kemerdekaan sehingga pasca kemerdekaan, desa selalu ditempatkan dalam posisi marginal baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok elit perkotaan.

Marginalisasi tersebut disebabkan berbagai keterbatasan yang disandang masyarakat desa, seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan per kapitanya kecil, maupun fasilitas sosial yang dimilikinya. Keterbatasan yang disandang desa tersebut tampaknya cenderung dipertahankan dengan asumsi untuk memperoleh keuntungan dari kondisi semacam itu, yaitu untuk menciptakan posisi tawar yang lemah bagi desa terhadap kekuasaan supra desa. Lebih jauh lagi secara administratif pemerintah, desa lebih diposisikan sebagai obyek kekuasaan.

Dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Perlu dikedepankan oleh pemerintah desa adalah bagaimana pemerintah desa mampu membangun, meningkatkan dan mendayagunakan kelembagaan desa yang kondusif, sehingga dapat mendesain standar pelayanan masyarakat yang mudah, murah dan cepat.

Dari segi politis selama ini desa dijadikan tempat pengumpulan suara pada waktu pemilu, setelah itu dilupakan. Sedangkan secara ekonomis, desa dipandang sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja yang murah. Penyeragaman dalam pengaturan Pemerintahan desa pada masa lalu telah menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam era otonomi saat ini. Kreativitas dan partisipasi tersebut sangatlah, dibutuhkan dalam pelaksanaan etonomi desa dalam rangka efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, sebagai agen pembaharuan.

Desa memiliki otonomi tradisional, artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Hakekatnya otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa merupakan otonomi yang telah ada sejak desa itu terbentuk berdasarkan adat istiadat dan tidak merupakan penyerahan dari pemerintah. Dengan demikian otonomi desa dikatakan sebagai otonomi murni. Urusan rumah tangga desa diperoleh tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku.

Upaya untuk mengembangkan pariwisata di suatu daerah dapat dilakukan dengan identifikasi potensi wisata di suatu kawasan sebagai daya tarik wisata. Potensi wisata tersebut pada dasarnya ada dua

potensi utama yaitu potensi fisik atau kenampakan alam dan interaksi budayanya. Sedangkan potensi yang lain hanyalah potensi pendukung atau potensi penunjang saja. Misalnya terdiri dari aksesibilitas, fasilitas, infrastruktur, keramah tamahan, keamanan, badan pengelola atau manajemen, promosi dan informasi, serta kondisi sosial budaya masyarakat sekitar objek wisata (Aprilianti, 2017).

Obyek wisata alam yang tersebar di laut, pantai, hutan, danau dan pegunungan adalah produk-produk potensial yang dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata alam. Setiap produk wisata alam memiliki tingkat amenities atau fasilitas, aksesibilitas, daya tarik, serta nilai daya saing tersendiri. Keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, keunikan, keindahan bentang alam serta gejala alam merupakan salah satu aspek penting yang menjadi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA). (Rusita dkk, 2016)

Dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada. Namun persoalan yang terjadi adalah kadangkala potensi tersebut tidak terkenali dengan baik, sehingga potensi dan sumber daya yang ada sering kali tidak didaya gunakan secara optimal. Oleh karena itu, pengenalan terhadap potensi yang dimiliki masyarakat sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan dalam pemecahan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam rangka mengembangkan pendapatan asli desa atau aset desa yang menjadi sumber utama dalam pembangunan desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Terlebih khusus potensi desa yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara baik, jujur dan benar hal ini terlihat masih banyak keluhan masyarakat dalam perbaikan jalan sepanjang area penambangan pasir oleh pemerintah desa, begitu juga masih banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat terkait biaya distribusi untuk perbaikan jalanan karena tidak ada transparansi oleh pemerintah desa pada seluruh masyarakat.

Dalam melakukan pengembangan potensi wisata perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa.

Desa Tompo memiliki potensi wisata air terjun sarang burung Air terjun ini mulai dikunjungi pada tahun 1995 yang berfungsi sebagai objek wisata yang berpotensi, selama 5 tahun air terjun ini sangat sering dikunjungi baik dari masyarakat setempat ataupun luar daerah

yang mengetahui tempat wisata ini karena pada tahun 2001 terjadi peristiwa yang memakan korban sehingga menyebabkan air terjun di Desa Tompo sepi pengunjung. Pada tahun 2007 pemerintah desa melakukan inisiatif untuk melakukan program perbaikan akses jalan ke tempat wisata bersama masyarakat setempat walaupun program perbaikan jalan ini belum sampai ke lokasi karena dana yang tidak mencukupi. Di tahun 2007 sampai 2016 wisata air terjun ini dikunjungi oleh banyak kalangan masyarakat karena akses jalan serta teknologi yang canggih sehingga masyarakat luar dapat mengakses tempat wisata ini melalui aplikasi maps.

Program perbaikan jalan mulai dipertimbangkan kembali di tahun 2016, sejak saat itu pemerintah desa dan aparat desa tidak akur dengan masyarakat disekitar air terjun disebabkan masyarakat setempat menginginkan dana sebesar 20% dari aparat desa, namun pemerintah desa tidak menyanggupi permintaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Terhadap Pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun Di Desa Tompo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo ?
2. Bagaimana peran pemerintah desa terhadap pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa terhadap pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori tentang peran pemerintah terhadap pemanfaatan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman nyata dalam bidang ilmu tentang pemanfaatan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Bagi Aparat Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada aparat pemerintah desa guna meningkatkan kualitas kerja sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang baik yang ditandai dengan adanya kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada desa. (Edo, 2023).

Konsep pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi terhadap dalam suatu Negara. Desa sebagai suatu kesatuan Masyarakat, berdasarkan adat dan hukum yang menetap terhadap suatu wilayah tertentu. Batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang disepakati bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Laksmi,2020).

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang desa dijelaskan pula bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan desa sangatlah penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa

merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan. Keberadaan perangkat desa yang juga disertai tugas di bidang pemerintahan menempati tempat yang sangat penting, karena sebagai instansi pemerintahan terendah, mereka sangat mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di daerah. (Edo,2023).

Desa sering digunakan untuk perencanaan wilayah, sehingga data buatan atau data informasi harus dihindari karena akan menghambat tujuan negara. Semakin membutuhkan kerja keras dan kemampuan yang lebih baik untuk mendorong kepatuhan terhadap tanggung jawab pemerintah (Edo,2023).

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. (Nurfadilla,2018).

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa peran pemerintah desa adalah pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat dalam pengembangan pembangunan desa dan sebagai pelindung bagi masyarakat desa dengan menyelenggarakan

ketertiban dan ketentraman masyarakat. Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a) Pemerintah sebagai fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang atas nama Pemerintah atau lembaga pengelola berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam menghadapi inovasi.(Tamara, 2023)

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat. (Fenti dkk,2023)

Dalam konteks ini, Pemerintah Desa memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang penggunaan teknis, strategi, dan pelaksanaan dalam program yang bermanfaat bagi pengembangan objek wisata.

- a. Menyediakan sarana dan prasarana menyediakan alat maupun bangunan yang membuat pengunjung betah ditempat tersebut yaitu dengan menyediakan mushollah, toilet, pondok, parkir dan berbagai fasilitas lainnya.
- b. Memfasilitasi aktivitas masyarakat memenuhi kebutuhan yang diinginkan pengunjung agar ingin datang lagi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan atau menyediakan fasilitas dalam hal ini Pemerintah Desa sebagai pengelola objek wisata. Dinas Pariwisata melanjutkan perannya yang kedua yaitu sebagai fasilitator. Dalam konteks ini, pemerintah Desa memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang penggunaan teknis, strategi, dan pelaksanaan dalam program yang bermanfaat bagi pengembangan potensi objek wisata.
(Tamara,2023)

b) Pemerintah sebagai regulator

Regulator yaitu tindakan berupa kegiatan untuk merumuskan aturan-aturan atau kebijakan. Peran pemerintah daerah sebagai regulator artinya dia memiliki peran pemerintah harus dapat memberikan acuan kepada masyarakat dan membuat peraturan untuk memberdayakan dan meningkatkan sektor pariwisata daerah.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan (Fenti dkk, 2023). Menjelaskan bahwa apabila dilihat dari segi fungsinya, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

- 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa,
- 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,
- 3) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong Masyarakat
- 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- 5) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa,
- 6) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan
- 7) dan lain sebagainya. (Iwan, 2021)

2. Potensi Wisata

Potensi wisata dapat diartikan sebagai daya tarik, keunikan, kekuatan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu objek yang dimiliki kemungkinan untuk mengembangkan sesuatu menjadi aktual atau nyata. Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu

wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri (Lamandasa, 2013).

Potensi wisata suatu kawasan dianggap memiliki potensi wisata apabila terdapat obyek wisata yang telah dan akan dikembangkan, kegiatan wisata (dalam hal ini kegiatan wisata alam) dan wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut (Septi, 2019).

Potensi pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat wisata (Septi,2019). dalam pengertian yang sama mengenai potensi wisata sebagai segala yang dimiliki oleh suatu daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut (Sukardi, 2016). Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

Dengan kata lain, potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourist attraction) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Potensi wisata dapat dibagi menjadi:

- a. Potensi wisata bersifat panorama alam yang berhubungan dengan cagar alam, suaka alam, termasuk flora dan fauna dengan pemandangan luar biasa dan indah.
- b. Potensi wisata bersifat apounturir, yaitu berhubungan dengan perjalanan menuju tempat-tempat dengan berbagai alat transportasi termasuk perjalanan safari, pendaki gunung, olahraga dan slancar.
- c. Potensi wisata bersifat bisnis/ekonomi, yaitu berhubungan dengan usaha perdagangan, diplomatik dan lain-lainya.
- d. Potensi wisata bersifat hiburan, alamiah, sosial dan budaya yaitu berhubungan dengan penikmatan nilai-nilai budaya tradisional atau modern berupa tari-tarian, hasil kerajinan tangan dan produksi setempat serta arsitektur budaya Indonesia. (Aprilianti 2017)

Kategori potensi dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Potensi tinggi, dikatakan potensi tinggi apabila objek wisata tersebut memiliki pemandangan alam yang sangat menarik, tempat bersih, tersedia fasilitas lengkap, seperti MCK, tempat ibadah, tempat parkir, pos keamanan dan kesehatan, memiliki sarana bermain dan istirahat, mempunyai atraksi wisata yang menarik, tersedia tempat makan dan minum, terdapat oleh-oleh khas objek wisata, aksesibilitas menuju lokasi mudah dijangkau, pelayanan wisata memuaskan.

- b. Potensi sedang, dikatakan potensi sedang apabila pemandangan di objek wisata kurang menarik, tersedia sarana seperti: MCK, tempat ibadah, tempat parkir, pos keamanan dan kesehatan, tempat parkir, tempat bermain dan istirahat, tempat makan dan minum, semua fasilitas tersebut ada namun tidak semua dapat digunakan atau kurang perawatan, aksesibilitas menuju lokasi objek wisata cukup sulit dan terdapat jalan yang rusak, pelayanan petugas wisata kurang ramah, atraksi wisata sedikit dan kurang menarik, cinderamata mata yang dijual kurang beragam.
- c. Potensi rendah, dikatakan potensi rendah apabila pemandangan alam tidak menarik, tersedia fasilitas MCK namun tidak terawat, pos keamanan dan kesehatan tidak tersedia, tidak ada tempat ibadah, tidak ada pedagang makanan dan minuman, tidak ada atraksi wisata, petugas wisata tidak ramah, aksesibilitas menuju lokasi wisata buruk, tidak ada cinderamata khas objek wisata. (Aprilianti 2017)

3. Potensi Desa

a. Pengertian Desa

Sebelum membahas pengertian potensi desa perlu dipahami dahulu tentang pengertian desa menurut beberapa sumber, antara lain:

- 1) Menurut R. Bintarto, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. (Wahidatun, 2019).
- 2) Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten.
- 3) Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

b. Potensi Desa

Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat

dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua: Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Potensi Fisik

Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa :

- a) Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu.
- b) Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
- c) Air pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air berfungsi

sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.

- d) Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.
- e) Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
- f) Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
- g) Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup

masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

2) Potensi Non fisik

Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparat desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:

- a) Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.
- b) Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti :

Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain.

Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi dan lain-lain. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan Badan Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).

Lembaga Ekonomi seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.

- c) Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. Peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa.

4. Objek Wisata

Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan objek wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya. (Sri, 2018).

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. (Sri, 2018)

Seorang wisatawan berkunjung kesuatu tempat/daerah/Negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung kesuatu tempat/daerah/Negara disebut daya tarik dan atraksi wisata.

Penggolongan jenis objek wisata akan dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap objek wisata. Menurut (Sri,2018) objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
- b. Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum, dan lain-lain.
- c. Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas organisasi, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat- pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Dalam membangun objek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat,

lingkungan hidup, dan objek wisata itu sendiri. Pembangunan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun Perseorangan dengan melibatkan dan bekerjasama pihak-pihak yang terkait.

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Keparawisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Kata wisatawan (tourist) berujuk kepada orang.

5. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Titis Karlana (2022) diambil dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sehingga Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang sehingga dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri.

Pemberdayaan jika dipandang dari sudut implementasi, maka menurut Idah Wahidah (2023) bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang mengarah pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, agar nantinya diharapkan

mampu menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan kebutuhan sehingga nantinya dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum.

Sementara Irwan Effendi (2021) menguraikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran sehingga nantinya diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya, menetapkan kebijakan, menyusun program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat disutau wilayah.

Berdasarkan pada pandangan tersebut pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat (*To Give Ability Or Enable*) yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program agar nantinya kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*To Give Authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. (Dipha, 2022)

b. Proses Pemberdayaan

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai kegiatan berorientasi pembangunan, tetapi justru posisi dari masyarakat adalah subyek dari sebuah bentuk kegiatan pembangunan. Merujuk pada cara pandang tersebut maka menurut Dipha Rizka Humaira (2022) dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, setidaknya harus melalui beberapa tahapan antara lain :

1) Penyadaran;

Proses penyadaran sering kali sulit dibedakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua kegiatan ini memiliki tujuan yang sama yakni menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang suatu tujuan yang hendak dicapai dan didalamnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku utama.

Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam proses penyadaran juga tidak berbeda dengan yang dilakukan pada proses sosialisasi. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan, serta menumbuhkan kebanggaan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat, seringkali diterapkan

metode pelatihan untuk menumbuhkan kembangkan motivasi atau *Achievement Monitoring Training* (AMT), yaitu latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.

2) Pelatihan;

Pelatihan merupakan suatu bentuk proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan formal, dan pelaksanaannya dalam waktu yang relative singkat dengan metode yang lebih mengutamakan prakter dari pada teori.

Dihubungkan dengan pengelolaan potensi desa wisata maka yang dijadikan sebagai sasaran pelatihan adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki potensi dan visi terhadap pengembangan potensi desa wisata dipedesaan.

3) Pendampingan

Pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik, olehnya itu sebagai bagian kegiatan pemberdayaan masyarakat meka bentuk pendampingan yang dimaksud yakni dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator.

Kegiatan pendampingan khususnya dikaitkan dengan pengelolaan potensi desa wisata diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan potensi wisata, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan inovatif.

4) Evaluasi;

Evaluasi merupakan proses pengawasan terhadap hasil dari pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan kepada masyarakat, dimana evaluasi ini juga dilakukan oleh masyarakat guna mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah dijalankan, untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

c. Prinsip Pemberdayaan

Sehingga untuk memahami tentang prinsip-prinsip dalam kegiatan pemberdayaan dimana menurut pandangan dari Yana Karyana (2023) secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam suatu proses pemberdayaan adalah kesetaraan atau kesejajaran dalam kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan, demikian pula

terhadap persoalan jenis kelamin juga tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan.

Mekanisme yang dibangun adalah hubungan kesetaraan yakni dengan saling berbagi kemampuan dan keahlian serta mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2) Partisipatif

Program pemberdayaan yang dianggap mampu untuk menstimulus kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan di evaluasi oleh masyarakat.

Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut dan juga agar kegiatan pemberdayaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan maka tentunya perlu waktu dan proses serta pendampingan dari semua pihak untuk berkomitmen dalam melakukan pemberdayaan.

3) Keswadayaan

Prinsip keswadayaan dapat dimaknai dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang yang memiliki kemauan rendah sebagai objek yang tidak berkemampuan (*The Have Not*), akan tetapi

masyarakat semacam ini merupakan subjek dengan kriteria memiliki kemampuan sedikit (*The Have Little*).

Masyarakat untuk golongan seperti ini tetap dianggap mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tentunya dapat dilihat dari pengalaman mendalam tentang kondisi lingkungannya, serta norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

Sehingga bantuan dari pihak lain yang diramu dalam konsep pemberdayaan dipandang sebagai penunjang, dimana bantuan yang diberikan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Olehnya itu dalam mendukung dan memberikan ruang keswadaan dalam diri masyarakat, maka kegiatan pemberdayaan harus selalu berprinsip “mulai lah dari apa yang mereka punya”.

Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga nantinya secara perlahan akhirnya suatu pengelolaan baik itu bersifat kelembagaan atau individu dapat dialihkan, dan menjadi sesuatu yang sifatnya mandiri.

4) Berkelanjutan

Sebuah program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara

perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi dengan berbasis kepada kebutuhan dan potensi dimasyarakat, (Idah Wahidah, 2023).

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan potensi desa wisata, dipandang perlu dilakukan agar nantinya maksud dan tujuan dari adanya potensi desa wisata sebagai destinasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Oleh karena itu, untuk mencapai maksud tersebut maka pemberdayaan merupakan alternatif terbaik dan pemberlakuannya dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*, melalui penggalian potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. (Fachruzzaman, 2023)

e. Kapasitas Masyarakat.

Kapasitas adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kapasitas merupakan tingkat kemampuan memproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu, jika tidak dilandasi dengan kapasitas yang memadai maka tidak akan mampu untuk memproduksi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) dalam perkembangannya, sampai saat ini dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Alasan ini dilatar belakangi karena *capacity building* merupakan konsep yang universal dan memiliki dimensi yang beragam. Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap.

Pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkatan individu, contohnya keterampilan-keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi- motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi- organisasi.
- b. Tingkatan organisasi, contohnya struktur organisasi- organisasi, proses pengambilan keputusan didalam organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan- hubungan dan jaringan organisasi.
- c. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.
- d. Capacity building (pengembangan kapasitas) adalah : serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja. Capacity building adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan. (Edo, 2023).

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun Data penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Tahun/Judul Penelitian/Variabel/Temuan Penelitian	Uraian
1.	Penulis Tahun Judul Penelitian Variabel Penelitian Temuan Penelitian	Setyoko J, Ristarnado R 2021 Strategi Pemerintah Desa Tanjung Alam Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Dalam Mengembangkan Pariwisata Telaga Biru. Pemerintah Desa, Pengembangan Pariwisata Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan dimensi dimensi strategi yakni : tujuan, kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah desa termasuk ke dalam strategi. Adapun strategi pemerintah desa tanjung alam dalam pengembangan wisata telaga biru yaitu penyediaan sarana dan prasarana wisata telaga biru, rencana tambahan promosi, pementukan pengurus tetap, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pelaksanaa promosi pariwisata nusantara terutama di dalam negeri dan pelatihan pemandu wisata.
2.	Penulis Tahun Judul Penelitian	Selamat Joko Utomo, Bondan Satriawan 2017 Strategi Pengembangan Desa Wisata Di

	<p>Variabel Penelitian</p> <p>Temuan Penelitian</p>	<p>Kecamatan Karang ploslo Kabupaten Malang</p> <p>Pengembangan Desa, Desa Wisata</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk sebagai upaya untuk merumuskan rencana strategis pengembangan desa wisata di kecamatan karangploslo yang berbasis pada keunikan dan sector unggulan lokal (pertanian, peternakan,jasa dll). Hasil analisis menunjukkan kecamatan karang ploslo memiliki potensi internal dan eksternal pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata. strategi yang digunakan berupa klaster pengembangan desa wisata, lembaga desa wisata dan pengembangan desa wisata dengan tema desa wisata berspektif go green yang unik, khas, dan sehat yang berbasis pada keunggulan hortikultural.</p>
3.	<p>Penulis</p> <p>Tahun</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Temuan Penelitian</p>	<p>Arief Setiawan</p> <p>2018</p> <p>Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi</p> <p>Pembangunan Pariwisata, Perspektif Sosial Ekonomi</p> <p>Kegiatan kepariwisataan dapat menjadi solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan. Beberapa daerah kota/kabupaten telah berhasil menggunakan pariwisata untuk mengembangkan daerahnya. Namun pemanfaatan sumber daya pariwisata juga mesti selaras dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya pariwisata berlandaskan budaya lokal dan pemberdayaan kelompok Masyarakat.</p>
4.	<p>Penulis</p>	<p>Kateria Fitriska</p>

	Tahun	2017
	Judul Penelitian	Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara
	Variabel Penelitian	Strategi pengembangan BUMDes, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	Temuan Penelitian	Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara saat ini belum berjalan dengan maksimal antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes serta masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari keberadaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara.
5.	Penulis	Ilham Zitri, Yudhi Lestanata, Inka Nusamuda Pratama
	Tahun	2020
	Judul Penelitian	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat.
	Variabel Penelitian	Pemerintah Desa, Pengembangan objek wisata berbasis masyarakat
	Temuan Penelitian	Pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat sudah diterapkan dan dilaksanakan sesuai prinsip dari konsep pariwisata berbasis masyarakat, Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat masih terdapat beberapa hambatan yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Poto Tano sehingga sulit untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat serta

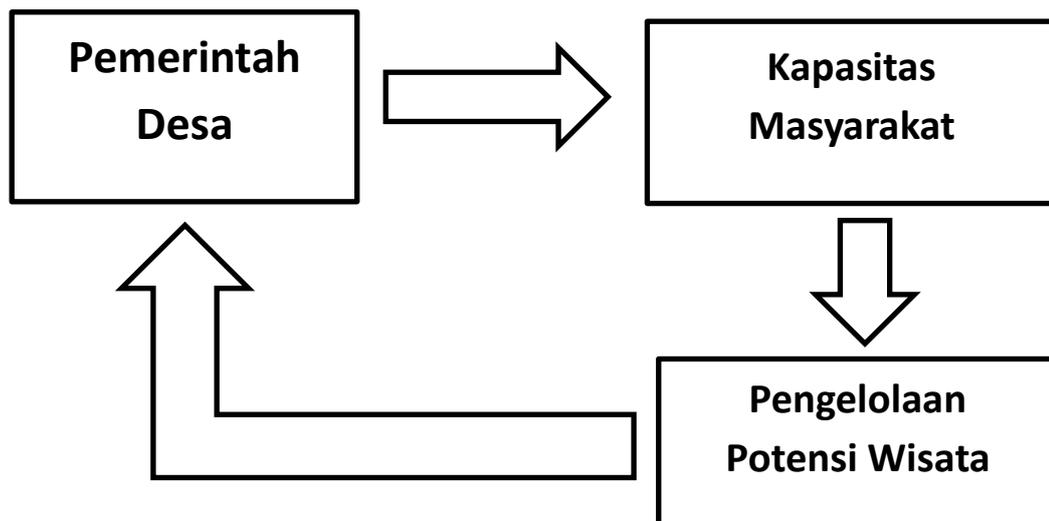
		fasilitas terbatas (sarana dan prasarana).
6.	<p>Penulis</p> <p>Tahun</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Temuan Penelitian</p>	<p>Nur Fadisa, Syamsurizaldi Syamsurizaldi, Hendri Koeswara</p> <p>2021</p> <p>Pembangunan wisata Berkelanjutan Pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau Di Kota Bukit tinggi.</p> <p>Pembangunan Wisata</p> <p>Pembangunan wisata berkelanjutan dikawasan geopark ngarai sianok di kota bukittinggi didorong oleh kemampuan untuk mendatangkan wisatawan yang datang member ikan dampak positif kepada sektor pariwisata yang meningkat setiap tahunnya.</p>
7.	<p>Penulis</p> <p>Tahun</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Temuan Penelitian</p>	<p>Resti, R</p> <p>2018</p> <p>Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Meleura Di Desa Lakarinta Kecamatan Lohia Kabupaten Muna</p> <p>Pemerintah Desa, Pengembangan objek wisata</p> <p>Strategi yang bisa dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata pantai meleura antara lain: meningkatkan promosi objek wisata, meningkatkan saran dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang seperti pembuatan taman wisata, pembuatan air terjun, perluasan parkir, penataan parkir, pelebaran jalan, penyediaan kuliner khas muna, penyediaan wahana air seperti baban boat, aquarium bawah laut, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, sehingga</p>

		menarik dan memberi kenyamanan bagi pengunjung serta mengadakan akomodasi pariwisata baik itu hotel, maupun villa, serta mengembangkan atraksi wisata dan melakukan koordinasi dengan pihak swasta untuk menanamkan modal agar pengembangan pantai meleura cepat terlaksana.
--	--	--

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada rumusan masalah yang menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini, maka kerangka pikir yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Siklus dari Kerangka Pikir Tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, yang bertugas di daerah setempat.
- b. Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat maka pemerintah desa terlibat langsung terhadap pengelolaan potensi wisata.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dapat mempengaruhi pengelolaan potensi wisata yang ada di daerah setempat.
- d. Pemerintah desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dapat mengelola potensi wisata yang ada dengan baik. Namun pemerintah desa tetap ikut serta terlibat dalam pengelolaan potensi wisata tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandaskan pada post-positivisme sehingga tepat digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Metode kualitatif menggunakan data yang dikumpulkan dan dinarasikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata sebagai gambaran utuh tentang obyek penelitian. Adapun alasan digunakannya metode ini adalah karena peneliti ingin melakukan pengamatan langsung, mengetahui dan mendapat informasi secara langsung kepada sumber data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Lokasi penelitian dipilih sebagai tempat penelitian karena permasalahan yang akan dibahas berada di lokasi tepatnya di Desa Tompo.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih 2 bulan dari bulan 05 April hingga 30 juni 2024.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan penentuan populasi dan sampel tetapi menggunakan narasumber/informan penelitian. Penentuan informan peneliti ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi berdasarkan tujuan tertentu dan diharapkan informan tersebut mengetahui permasalahan yang menjadi obyek penelitian secara mendetail. Selain itu untuk melengkapi kebutuhan data digunakan teknik *snowballsampling* guna mengantisipasi keterbatasan data yang diperoleh, dengan menunjuk informan baru dan seterusnya sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap dan mendalam.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari Kepala Desa (Kades), Mantan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staff Aparat Desa, Masyarakat. Jenis dan metode sampling dalam penelitian pelaksanaan Program DMIJ ini menggunakan Teknik Sampling Jenuh untuk Perangkat Desa dan Teknik Sampling Aksidental untuk Tokoh Masyarakat.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menurut Sugiyono (2012) Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut ditarik kesimpulannya.

Definisi operasional variabel merupakan aspek penelitian yang telah memberikan informasi tentang bagaimana caranya dalam mengukur variabel dengan merumuskan secara singkat, dan tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Dalam definisi operasional variabel ini, penelitian telah mendefinisikan secara jelas mengenai variabel bebas (*Independent*) dan variabel terikat (*Dependent*) yang telah digunakan.

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*) (X)

Variabel bebas atau yang sering disebut dengan *independent variable* merupakan variabel terikat atau *dependent variable* (Sugiyono, 2012).

a. Peran Aparatur Pemerintah Desa (X1)

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada desa. (Edo,2023).

b. Potensi Wisata (X2)

Potensi wisata dapat diartikan sebagai daya tarik, keunikan, kekuatan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu objek yang memiliki kemungkinan untuk mengembangkan sesuatu menjadi aktual atau nyata. Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri (Lamandasa, 2013).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*) (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel dependent (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependent adalah peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Variabel peningkatan Pendapatan Asli Desa diukur dengan adanya sistem wawancara serta dokumentasi dengan berbagai pertanyaan yang dilakukan dan dikembangkan oleh peneliti. Indikator yang digunakan dalam mengukur peningkatan pendapatan asli desa yaitu tahap pelaksanaan, hasil usaha, hasil aset, serta swadaya, dan partisipasi masyarakat

E. Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari sumber data yang ditemukan, maka pengumpulan data yang dilakukan dapat menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu :

1. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian tanpa melewati orang atau lembaga lain dengan cara wawancara dan observasi (Hadi, 2006).
- b. Data Sekunder, yaitu data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan dan keuangan (Ruslan, 2006).

2. Sumber Data

- a. Data Primer, data langsung yang diterima oleh peneliti dari narasumber atas hasil wawancara tanya jawab yang di lakukan antara peneliti dan narasumber.
- b. Data Sekunder, data yang diterima oleh peneliti berupa dokumen-dokumen yang berkaitan oleh narasumber terkait data yang diperlukan peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan”. Menurut Nazir (2014) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Dimana pengumpulan data tersebut dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu: Metode langsung, Metode dengan menggunakan pertanyaan, dan Metode khusus.

Pengumpulan data memang merupakan faktor penting dalam penyelesaian hasil penelitian. Maka, agar mendapatkan data yang valid dan obyektif sebagai landasan kuat terhadap kesimpulan yang diberikan pada hasil penelitian. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu berupa :

a. Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008) “Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti melihat dan mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer”.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang menguasai tentang seluruh rangkaian sistem yang terdapat dalam suatu objek kajian penelitian ataupun informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan suatu informasi mengenai kajian penelitian yang dilakukan. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban

atas pertanyaan itu. Menurut Husaini Usman (2009) “Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.”

c. Dokumentasi

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008) Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Sedangkan Arikunto (2010) “Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis, dokumentasi berarti penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain”. Sehingga dari keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dokumentasi merupakan pengambilan data dari dokumen-dokumen serta data sekunder lain yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan Observasi terfokus yang merujuk hanya kepada perumusan masalah dan tema penelitian, pertanyaan dilakukan dengan menggunakan angket pada sebagian pertanyaan dan melalui wawancara untuk sebagian lainnya, wawancara yang dilakukan mengacu pada wawancara pembicaraan informal dengan melibatkan Kepala Desa (Kades), Mantan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staff

Aparat Desa, Masyarakat. Pada akhir penelitian, peneliti akan mendokumentasikan pengumpulan data-data dari berbagai sumber.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (2014) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empirik sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung yang dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Sejarah Umum

Pada mulanya Tompo hanya terdapat satu tempat pemukiman yang disebut WANUAE BACU-BACU yang diperintah seorang Arung (Raja) dengan gelar Arung BACU-BACU. Kampung BACU-BACU sekarang tidak lagi merupakan suatu pemukiman tetapi hanya suatu lokasi pekuburan. Di Desa Tompo Arung BACU-BACU mempunyai anak perempuan yang cantik dari ketiga anak Raja dan sebagai anak bungsu.

Anak tersebut dengan secara tiba-tiba tersebar ke pada semua Jowa (pengikut Raja) suatu berita yang mengatakan bahwa anak marung sedang hamil 5 bulan. Dengan tersebarnya berita tersebut sampailah ditelinga oleh seorang PASSEPPI Raja sebagai orang yang paling dipercaya oleh Arung. Sekarang mengandung lima bulan, dengan diketahuinya Arung langsung memanggil putrinya dengan menanyakan bahwa benarkah kamu sedang hamil dan siapa laki-laki yang menodai kamu. Putri Arung menjawab kepada Arung, wahai puang, saya tidak berani menyatakan diri saya hamil lima bulan tetapi yang jelas saya terlambat haid sudah lima bulan dan adapun laki-laki yang berani menodai saya, saya tidak berani pula menunjuk siapa-siapa oleh karena jangkauan laki-laki lain yang menyentuh saya melihat

saja aurat saya tidak ada seorang pun oleh karena saya selalu menjaga citra dan martabat saya sebagai seorang putri.

Menjelang Magrib telah sampailah disuatu tempat dengan terdapat sebuah batu besar, sang Putri meminta kepada Jowa yang mengantar agar dia kasih singgah sebentar didekat batu yang besar itu lalu Jowa memberhentikan dan anak Arung turun dari atas usungannya lalu langsung naik di atas batu sambil mengatakan kepada para jowa pengantar bahwa dengarkan semua wahai pengantar saya akan bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Diangkatlah kedua telapak tangan dengan doa “ Ya Allah Ya Rabbi perhatikanlah perhatikanlah kekuasaanmu kepada semua Jowa pengantar saya untuk dibuang bahwa bila isi kandungan saya ini karena atas perbuatan bukan dari manusia biasa. Ya Allah hancurkanlah batu ini dan ceburkan masuk kedalam tanah bersamaku.” Dengan selesainya ungkapan itu maka terjadilah suatu ledakan dengan batu yang diduduki anak Arung terus hancur dan tercebur masuk kedalam tanah dan seketika itu pula hilanglah anak Arung terus hancur dan tercebur masuk kedalam tanah dan seketika itu pula hilanglah anak Arung terus muncul semburan air dari dalam tanah yang cukup deras maka tiba-tiba para Jowa pada kaget, dengan hilangnya anak Arung paniklah semua Jowa dan mengadakan pencarian dengan menggunakan obor yang terbuat dari kelapa (penrung) diwaktu antara Magrib dan Isya.

Dengan diadakan pencarian yang cukup memakan waktu terus dengan tiba-tiba salah seorang Jawa berteriak dengan mengatakan “Engkai Tompo Riasena Wiri Batu Sabue”, (dia sudah muncul diatas pinggiran batu yang tercebur) kedalam selimuti dengan curahan hujan, air yang muncul dari dalam tanah, dengan demikian diberikan nama tempat itu tanah “TOMPO” sedangkan tempat air yang muncul dari dalam tanah tersebut disebut “JUMPERENGE”.

Jadi dengan adanya ungkapan engkai Tompo maka diberilah nama Tanae Tompo dan setelah menjadi tempat pemukiman penduduk maka diberilah nama Kampung Tompo. Kampung Tompo pada masa Revolusi Fisik tahun 1945 Tompo termasuk daerah Defaktor pejuang-pejuang Kemerdekaan RI dimana Tompo merupakan salah satu pertempuran Ekspedisi ALRI/TRI melawan belanda tahun 1947 dibawah pimpinan Kapten HASARALA dengan beranggotakan 36 orang bersama-sama pula dengan pasukan Gerilya dengan berkedudukan di Tompo.

Sebagai bukti bahwa Tompo pernah menjadi lokasi pertempuran maka para pejuang revolusi telah membuat suatu monumen bersama dengan sebuah tempat beribadah (sebuah mesjid) yang diresmikan oleh R. KASENDA laksamana madya TNI yang lokasinya tidak jauh dari lokasi JUMPERENGE yang sekaligus merupakan sumber mata air dengan melalui perpipaan untuk ke rumah penduduk di Dusun Tompo bahkan sebagian ke Dusun Barang untuk di konsumsi oleh penduduk.

Tompo berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka terbentuklah suatu Desa dengan nama Desa Tompo terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Barang, Dusun Kalompi, Dusun Galung, Dusun Tompo, Dusun Batulappa dan setelah diadakan pemekaran Desa maka Desa Tompo dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Tompo dan Desa Galung.

Adapun yang pernah menjabat sebagai kepala Desa Tompo.

1. LA BADE (Definitif)
2. LA PATAWE (Definitif)
3. H.M. ARSYAD (Definitif)
4. ADAM BACO, SE Periode Tahun 1999-2004 (Definitif)
5. JUMRI Periode Tahun 2005-2017 (Definitif)
6. IBRAHIM, S.Sos. M.'Si Periode Tahun 2011 & 2017 (Pejabat)
7. SUHARDI B Periode Tahun 2018-2024 (Definitif)

Demikian riwayat singkat Desa Tompo yang sempat kami utarakan dalam mengenal Desa Tompo.

B. Keadaan Demografi

Desa Tompo adalah salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Barru yang merupakan Desa yang berada di daerah pegunungan yang berjarak kurang lebih 15 Km dari Ibu Kota Kabupaten Barru dari sebelah timur dimana lokasi pemukiman penduduknya diselimuti oleh bukit dan pegunungan, dengan luas Wilayah 34,86 Km.

Desa Tompo terdiri dari 4 Dusun 20 RT. dengan batas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.1
BATAS DESA TOMPO**

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Binuang	Balusu
Sebelah Selatan	Palakka	Barru
Sebelah Timur	Soppeng	Kab. Soppeng
Sebelah Barat	Sepe' E	Barru

Secara Visualisasi, wilayah administratif dapat dilihat dalam Peta Wilayah Desa Tompo Sebagai berikut :

**Tabel 4.2.
LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAANNYA.**

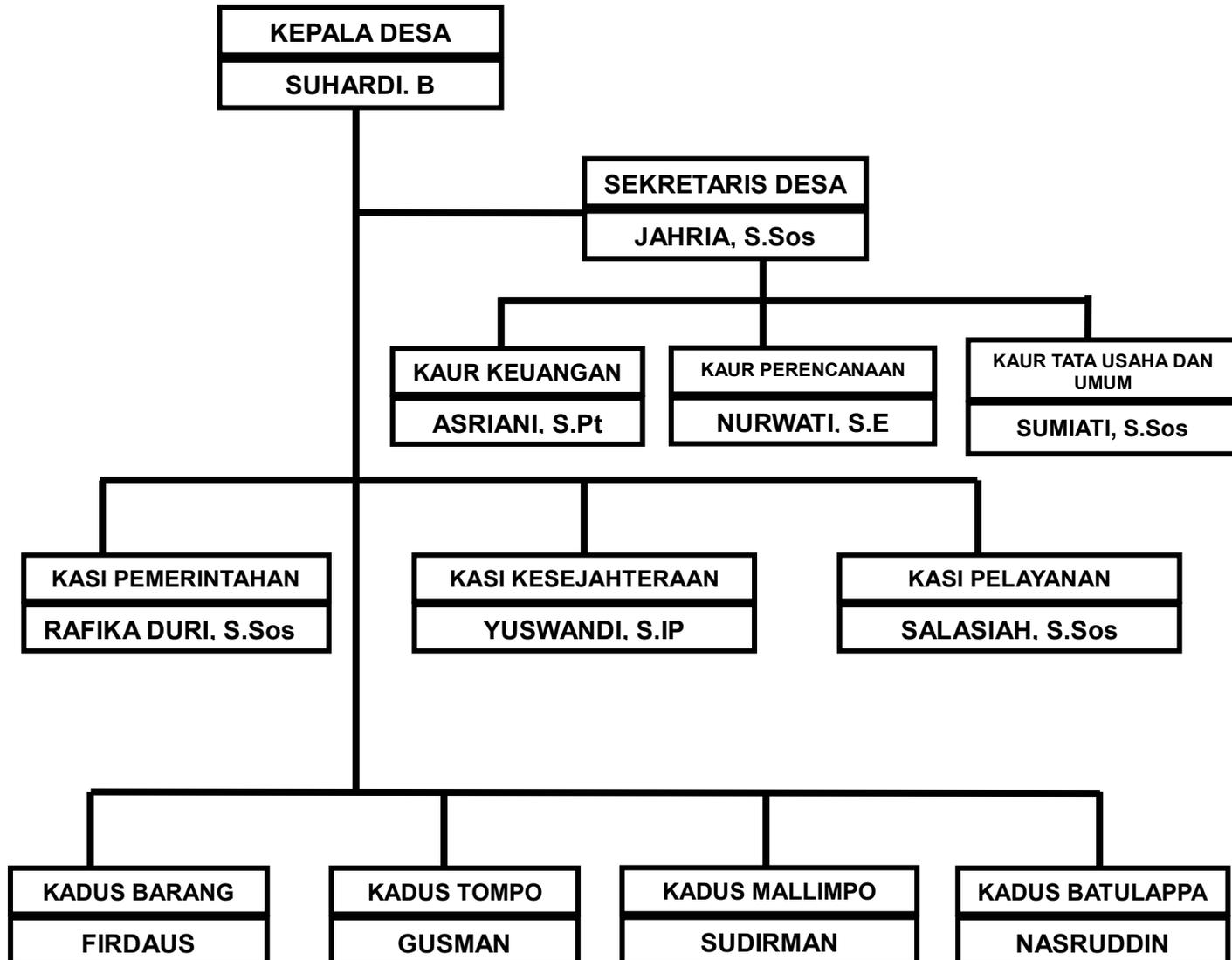
NO	Wilayah	Luas Tanah (Ha)
1.	Lahan Sawah	5.320
2.	Lahan Ladang	2.243
3.	Lahan Perkebunan	3.337
4.	Hutan	18.052
5.	Lahan Lainnya	7.788

Jumlah penduduk Desa Tompo termasuk kurang padat jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pendapatan Profil Desa yang dilakukan pada tahun 2022, tercatat jumlah penduduk Desa Tompo sekitar 2.881 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.408 jiwa dan perempuan sebanyak 1.473 jiwa.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tompo

Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Tompo



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun di Desa Tompo

Desa Tompo merupakan salah satu desa di Kecamatan Barru yang memiliki potensi yang cukup besar terutama dibidang pariwisata. Potensi desa tompo dapat dilihat pada potensi desa yaitu air terjun sarang burung yang terletak di Dusun Batulappa. Dengan jarak sekitar 1,5 km dari jalan umum. Wisata air terjun ini terkenal dengan keindahan dan kebersihannya yang terjaga sekaligus dijadikan sebagai sumber mata air untuk masyarakat sekitar.

Peran pemerintah desa terhadap pengembangan potensi wisata. Potensi wisata yang ada di Desa Tompo salah satunya adalah Air Terjun Sarang Burung dengan melihat bahwa perkembangan potensi ini jika dikembangkan dan diolah dengan baik maka wisata ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang potensial.

Air terjun ini dijadikan sebagai objek wisata pada tahun 1995, selama 5 tahun air terjun ini sangat sering dikunjungi baik dari masyarakat setempat ataupun luar daerah yang mengetahui tempat wisata ini, pada tahun 2001 terjadi peristiwa yang memakan korban sehingga menyebabkan air terjun di Desa Tompo sepi pengunjung. Di tahun 2007 sampai sekarang wisata air terjun ini dikunjungi lagi oleh

banyak kalangan masyarakat. Walaupun pengunjung yang sekarang tidak seramai di tahun sebelumnya.

Pengembangan desa wisata Air Terjun Sarang Burung masyarakat berpartisipasi penuh baik dalam tahap pengembangannya maupun tahap perencanaan. Masyarakat desa Tompo melakukan musyawarah untuk mengembangkan desa wisata Air Terjun Sarang Burung dengan melibatkan sepenuhnya kepada masyarakat desa, pada tahap implementasi semua masyarakat setempat terlibat dalam pengelolaan potensi lokal yang ada di Desa Tompo dalam tahap pengawasan masyarakat diawasi dan di kontrol oleh pemerintah desa.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan desa wisata seperti halnya pada Air Terjun Sarang Burung yang berada di Desa Tompo.

1. Tahap yang pertama seleksi lokasi/ wilayah sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga pihak terkait dan masyarakat. Hasil wawancara dengan kepala desa bahwa:

“Tempat wisata air terjun tersebut sudah ada bahkan sebelum berdirinya Desa Tompo. Namun baru dikembangkan dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata sejak tahun 1995 dan masalah tempat ini sudah dibicarakan serta ada kriteria yang telah disepakati bersama.”

2. Tahap kedua sosialisasi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengkomunikasikan dan menciptakan dialog dengan masyarakat perihal perencanaan pembangunan objek wisata air terjun sarang burung. Menurut Kepala Desa bahwa,

“Awal pembukaan air terjun sebagai destinasi wisata bermula dilakukannya observasi dari pemerintah desa serta aparat desa lainnya yang dipantau dari masyarakat setempat serta melalui sosialisasi bersama antara masyarakat dan aparat desa lainnya, karena masyarakat akan sadar adanya potensi wisata dapat disosialisasikan bersama untuk mengenalkan wisata yang populer dikalangan masyarakat luas.”

3. Tahap ketiga melalui proses pemberdayaan masyarakat yang melibatkan penuh masyarakat setempat untuk mengelola dan mengatur semua jalanya kegiatan destinasi wisata tersebut.

Menurut sekretaris desa bahwa:

“Salah satu upaya pemerintah desa kepada masyarakat adalah dengan mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan objek wisata air terjun sarang burung yang berlokasi di Dusun Batu Lappa Desa Tompo.”

Hal ini sejalan dengan pendapat salah satu masyarakat setempat, bahwa:

“Pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam perancangan pengelolaan objek wisata sarang burung dengan mengupayakan untuk mengundang masyarakat dalam musyawarah yang akan dilakukan”

4. Tahap keempat kemandirian masyarakat, berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup di desa wisata. Seperti dengan adanya desa wisata banyak meningkatkan taraf hidup untuk masyarakat Desa Tompo karena semua kegiatan dilakukan hanya untuk masyarakat setempat dan tidak ada dari pihak luar.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan kemandirian masyarakat dalam mengelola kegiatan yang ada di desa tersebut. Kemandirian masyarakat meliputi mandiri berfikir, bertindak dan mengendalikan serta pengelolaan

yang akan mereka lakukan. Kemandirian masyarakat yang dialami oleh masyarakat tersebut ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

Namun, penulis menganalisis hambatan yang ada dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Tompo. Berdasarkan hasil penelitian, masalah yang terdapat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Adapun faktor penghambat pengembangan Potensi Wisata Air Terjun Sarang Burung adalah keterbatasan sumber daya manusia yang meliputi adanya perbedaan kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Namun masyarakat belum memahami posisinya dalam pemberdayaan, serta latar belakang pekerjaan masyarakat. Masih ada masyarakat yang belum mau terlibat dalam pengelolaan potensi wisata Air terjun sarang burung. Menurut salah satu masyarakat setempat bahwa:

“Masyarakat tidak semua ikut terlibat dalam pengelolaan objek wisata air terjun sarang burung, dikarenakan pekerjaan masyarakat yang mereka utamakan, seperti bertani, berkebun, perkantoran serta pemuda yang sudah merantau ke luar daerah.”

Aparat desa Tompo, hingga kini masih bersinergi melakukan musyawarah, pendekatan baik secara personal maupun berkelompok, dengan adanya sosialisasi serta pembinaan, agar masyarakat memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Aparat desa berusaha meyakinkan tokoh masyarakat bahwa pengelolaan dan pengembangan potensi wisata Air Terjun Sarang Burung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menunjang perekonomian masyarakat sekitar.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Desa Tompo masih jauh dari harapan, seperti tidak adanya lahan parkir, toilet, ruang ganti, gazebo, dan lain sebagainya. Keterbatasan seperti ini sewaktu-waktu dapat menghambat kegiatan di desa. Padahal, keberadaan sarana dan prasarana akan sangat menentukan mobilitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan.

Langkah sementara yang tengah diupayakan oleh aparat desa adalah dengan memaksimalkan fasilitas yang ada dan dana yang tersedia. Disamping itu, aparat desa dan masyarakat senantiasa berkolaborasi untuk meyakinkan para pengunjung bahwa keterbatasan-keterbatasan itu tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

c. Kondisi Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik Air Terjun di Desa Tompo masih jauh dari kata sempurna. Lingkungan di sekitar Air Terjun tersebut masih perlu di kaji ulang dan memerlukan banyak pembenahan dari masyarakat dan pemerintah setempat. Pembenahan ini dapat dimulai dari kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan terlibat aktif dalam penyelenggaraan bina lingkungan. Melalui keterlibatan yang aktif, masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak nyata sehingga memberikan pengaruh yang baik terhadap kelestarian lingkungan sekitar

B. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun Di Desa Tompo

Potensi pariwisata dapat dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang bersifat alami, daya tarik wisata juga masih sangat asli, dan ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk lokal. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

Destinasi atau daya tarik wisata banyak dijumpai di daerah Kabupaten Barru, baik potensi kesenian, sejarah dan budaya, serta kehidupan masyarakat. Dari sekian banyaknya aktifitas wisata yang

dapat di jumpai di Kabupaten Barru, yang menarik perhatian adalah wisata alam.

Peningkatan potensi pariwisata air terjun di Desa Tompo membutuhkan peran dari pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga atau kelompok yang mempunyai kedudukan di tingkat wilayah, dengan begitu sangat berperan dalam peningkatan potensi pariwisata air terjun di Desa Tompo. Wisata Air Terjun Desa Tompo sendiri merupakan salah satu air terjun dari beberapa air terjun yang ada di Kabupaten Barru yang memiliki keindahan alam yang fantastis dan masih asri, dengan demikian air terjun Desa Tompo memiliki potensi untuk dijadikan objek wisata unggulan di Kabupaten Barru.

Pengembangan wisata, tentu mempunyai masalah di berbagai sektor yang harus di atasi. Adapun beberapa masalah di berbagai sektor dalam pengembangan wisata alam air terjun ini, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Fasilitas di Obyek Wisata

Fasilitas di salah satu obyek wisata di desa Tompo yaitu pada Wisata Air Terjun Sarang Burung. Fasilitas wisata ini masih belum memadai dan masih kurangnya fasilitas seperti warung atau lapak yang menjual makanan dan minuman, mushalla, gazebo, dan fasilitas lainnya. Kurangnya fasilitas wisata ini akan mengganggu kenyamanan pengunjung saat datang ke Lokasi.

Fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh pengunjung dalam menunjang aktifitas mereka saat berwisata. Selain itu, fasilitas juga dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan dari kegiatan pariwisata terutama pada obyek wisata Air Terjun Sarang Burung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fasilitas wisata sangat dibutuhkan oleh pengunjung karena hal ini menjadi nilai tersendiri bagi kebutuhan pengunjung juga.

2. Akses Jalan ke Obyek Wisata Yang Belum Mendukung

Akses jalan menuju Desa Tompo memang sudah cukup memadai. Namun, di satu sisi akses jalan menuju lokasi juga tidak luput dari perhatian pengunjung yang berkunjung ke air terjun sarang burung yang ada di desa Tompo.

Kondisi akses jalan masuk menuju lokasi yang belum memadai mempengaruhi kenyamanan dari para pengunjung. Mereka berharap bahwa akses jalan menuju lokasi air terjun sarang burung bisa di perbaiki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akses mempunyai peran penting di dalam pariwisata.

3. Anggaran Yang Terbatas

Anggaran untuk pengembangan pariwisata di desa Tompo khususnya untuk obyek wisata air terjun sarang burung saat ini mengandalkan dana desa. Selain itu juga, dana bantuan dari pihak pemerintah. Akan tetapi, dana tersebut belum mencukupi secara penuh dan masih banyak kekurangannya baik untuk

fasilitas ataupun segala hal yang menunjang pariwisata itu sendiri. Anggaran dana merupakan hal yang paling penting, karena tanpa adanya dana yang mencukupi maka keberlangsungan kegiatan maupun program tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal.

Adapun konsep yang ditawarkan pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata Air Terjun Desa Tompo maka penulis mencoba menggambarkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator.

1. Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang permodalan dan pendanaan melalui pemberian bantuan modal.

a. Membangun Sarana dan Prasarana

Dari hasil observasi, pelayanan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata alam air terjun Desa Tompo terhadap pengunjung, pemerintah desa memiliki inisiatif tersendiri untuk menyediakan sarana dan prasarana. Dari hasil wawancara dengan kepala desa mengatakan bahwa:

”Disini pemerintah memiliki inisiatif yang sangat besar untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung seperti perbaikan jalan, pembuatan tempat sampah, pembuatan jalan masuk ke tempat wisata walaupun belum sampai di tempat air terjun, serta pengadaan WC umum ”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelayanan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata tersebut yaitu seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi pengunjung. Namun perlu juga di adakan promosi agar wisata air terjun ini dapat di ketahui oleh masyarakat dan pengguna internet. Namun sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan Desa Tompo hanya sekedar sistem promosi dengan melalui komunikasi antar muka, media cetak dan media telekomunikasi meskipun belum efektif namun setidaknya sudah ada usaha pemerintah desa untuk mengembangkan tempat wisata yang ada di Desa Tompo. Seperti yang di katakan salah satu staf aparat desa sebagai berikut:

“Dalam mengembangkan air terjun ini, pemerintah melakukan promosi seperti memperkenalkan tempat ini melalui media sosial”.

Informasi yang diberikan melalui situs internet saat ini masih banyak keterbatasan informasi untuk mempromosikan dan mengenalkan Pariwisata Desa Tompo khususnya objek wisata alam Air Terjun Sarang Burung kepada masyarakat luas. Selain informasi-informasi yang diberikan tersebut belum memasukkan potensi-potensi yang ada serta kurangnya inovasi penggunaan teknologi informasi seperti pengadaan akun sosial media tersendiri.

Keuntungan penggunaan internet adalah ketersediaan selama 24 jam, pencarian informasi yang sangat cepat dan mudah

dapat dilakukan dengan fasilitas googling. Dengan sekian banyak fasilitas, tentunya informasi khususnya tentang destinasi wisata dapat lebih mudah diakses dan disebarluaskan dengan sangat cepat dibandingkan dengan mencari informasi melalui media cetak atau dari mulut ke mulut. Selain sebagai media penyedia informasi juga dapat memudahkan pengunjung untuk berinteraksi dengan operator pariwisata. Namun hingga saat ini operator pariwisata yang telah memanfaatkan internet untuk melayani pelanggannya masih belum ada.

Wisata air terjun di desa tompo menjadi salah satu destinasi pariwisata favorit masyarakat di Kabupaten Barru pada hari libur sekolah. Kawasan objek wisata ini di anggap sangatlah potensial dan belum mendapat ekspos secara penuh. Selain itu perjalanan dari jalanan umum ke lokasi wisata memakan waktu (kurang lebih 40 menit) karena banyaknya tanjakan dan apabila telah turun hujan maka jalanan licin.

Kabupaten Barru memiliki potensi objek wisata alam, budaya, dan kuliner yang tak kalah dengan daerah lain. Posisi sektor pariwisata kabupaten Barru menjadi salah satu pilar yang sangat berpengaruh dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata akan bertambah besar dan

pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Barru sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki beragam objek wisata yang berpotensi bagi pengembangan pariwisata, namun dengan berbagai keterbatasan maka pengembangan pariwisata belum berjalan baik. Selain memiliki objek wisata alam, ada terdapat objek-objek wisata lainnya dan untuk saat ini pemerintah setempat berusaha mengembangkan objek wisata dengan memberikan berbagai sarana penunjang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik dari dalam maupun dari luar.

Pengelolaan objek wisata alam air terjun sarang burung masih memiliki banyak kekurangan dalam hal pengelolaannya. Pengelolaan objek wisata alam air terjun sarang burung tidak terlepas dari campur tangan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah desa berharap agar masyarakat yang ada di sekitar objek wisata alam air terjun sarang burung tetap menjaga keindahan dan kebersihan wisata alam. Oleh karena itu harus ada kerja sama pemerintah dengan masyarakat karena masyarakat yang akan menjaga dan membersihkan objek wisata tersebut.

Program pengelolaan objek wisata alam merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas objek wisata dan

meningkatkan jumlah pengunjung. Namun pengelolaan objek wisata ini masih minim. Tapi dengan adanya objek wisata ini masyarakat setempat memiliki banyak peluang untuk membuka lapangan kerja. Seperti yang di katakan salah satu staf aparat desa sebagai berikut:

“Bahwa setiap hari libur masyarakat sekitar objek wisata air terjun sarang burung menjual minuman dan makanan-makanan kecil untuk pengunjung”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya objek wisata alam air terjun sarang burung masyarakat sekitar dapat membuka usaha dengan menjual minuman dan makanan kecil untuk pengunjung. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar objek wisata air terjun sarang burung karena mendapat peluang untuk membuka usaha meskipun kecil. Selain itu pemerintah juga sangat bangga dengan kerja sama yang baik dari masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi objek wisata tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat di sekitar lokasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan potensi-potensi objek wisata yang ada untuk menunjang kepariwisataan di Daerah Kabupaten Barru.
- 2) Mempromosikan objek-objek wisata alam melalui media elektronik, media cetak, ataupun dari individu ke individu lain.

- 3) Membangun segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung dalam kegiatan liburan, agar pengunjung merasa aman, nyaman dan akhirnya berkeinginan untuk berkunjung kembali.
- 4) Meningkatkan kemampuan serta keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal memberikan pelayanan kepada pengunjung.

2. Sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah memberikan referensi kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan .

a. Aturan retribusi karcis/tiket pengunjung

Retribusi merupakan pungutan biaya yang di pungut sesuai aturan-aturan yang telah di sepakati pemerintah desa bersama masyarakat setempat. Dari hasil observasi, setiap pengunjung yang datang ke objek wisata alam air terjun sarang burung tidak dikenakan biaya atau gratis bagi semua orang dari hasil wawancara dengan mantan kepala desa mengatakan bahwa:

”Pengunjung yang datang tidak dikenakan biaya masuk karena belum ada keterbatasan area lokasi dari wisata alam ini.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa setiap pengunjung yang datang di objek wisata alam air terjun sarang burung tidak dikenakan biaya

apapun dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat sekaligus menjadi kelebihan dari tempat wisata ini.

b. Aturan larangan membawa senjata tajam dan obat terlarang

Objek wisata alam air terjun sarang burung merupakan objek wisata di Kabupaten Barru, untuk memasuki kawasan objek wisata alam ini pengunjung di larang membawa benda tajam dan obat-obat terlarang. Dari hasil wawancara dengan Kepala desa mengatakan bahwa:

”Pengunjung yang datang ke objek wisata alam air terjun sarang burung tidak diperbolehkan untuk membawa senjata tajam ataupun obat-obat terlarang karena akan dikenakan sanksi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan kepala desa penulis menyimpulkan bahwa untuk memasuki objek wisata ini pengunjung di larang membawa senjata tajam, karena benda tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, begitu pula dengan obat terlarang pengunjung di larang membawa obat-obat terlarang ketika memasuki objek wisata alam ini karena akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

C. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun di Desa Tompo

Objek wisata air terjun sarang burung merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Barru, yang informasinya dapat ditemukan di berbagai media elektronik, air terjun ini terkenal akan keindahan alamnya. Dalam mengelola tempat wisata ini, pemerintah desa tompo berusaha melakukan pemberdayaan, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan air terjun srang burung.

Perlibatan masyarakat ini merujuk pada pendapat Ade dan Risna (2021) bahwa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, masyarakat sangat berpartisipasi dalam pembangunan merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata. Keikutsertaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kemauan, kesempatan, dan kemampuan dari masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan desa

wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Tyas (2019) dalam penelitiannya juga menguraikan bahwa pengembangan desa wisata berbasis masyarakat merupakan kegiatan pembangunan desa yang sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal sebagai pemegang kepentingan. Secara formal pengembangan wisata berbasis masyarakat ini merupakan kebijakan resmi pemerintah sebagaimana tersirat dalam prinsip kepariwisataan Indonesia yang dirumuskan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan temuan, penulis mendapatkan gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di desa Tompo yang dikembangkan menjadi desa wisata merupakan upaya yang baik untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penekanan serupa juga dikemukakan oleh Tyas (2019) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat serta martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan

masyarakat dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial terutama kemiskinan yang dilakukan berbagai elemen mulai dari pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat melalui sebuah organisasi yang melibatkan sebagian masyarakat setempat.

2. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun Di Desa Tompo

Peningkatan potensi pariwisata air terjun di Desa Tompo membutuhkan peran dari pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga atau kelompok yang mempunyai kedudukan di tingkat wilayah, dengan begitu sangat berperan dalam peningkatan potensi pariwisata air terjun di Desa Tompo.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nurfadilla (2018) bahwasanya dengan pengelolaan yang baik, pariwisata berperan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan. Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri. (Nurfadilla,2018).

Dalam penelitian Ilham Zitri, Yudhi Lestanata, dan Inka Nusamuda Pratama (2020) dengan judul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat. Hasil penelitian yaitu pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat sudah diterapkan dan dilaksanakan sesuai prinsip dari konsep pariwisata berbasis masyarakat, Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat masih terdapat beberapa hambatan yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Poto Tano sehingga sulit untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat serta fasilitas terbatas (sarana dan prasarana).

Adapun penelitian Resti (2018) berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Meleura Di Desa Lakarinta Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, hasil penelitian strategi yang bisa dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata pantai meleura antara lain: meningkatkan promosi objek wisata, meningkatkan saran dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang seperti pembuatan taman wisata, pembuatan air terjun, perluasan parkir, penataan parkir, pelebaran jalan, penyediaan kuliner khas muna, penyediaan wahana air seperti baban boat, aquarium bawah laut, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, sehingga menarik dan memberi kenyamanan bagi pengunjung serta mengadakan akomodasi pariwisata baik itu hotel, maupun villa, serta mengembangkan atraksi wisata dan melakukan koordinasi dengan pihak swasta untuk menanamkan modal agar pengembangan pantai meleura cepat terlaksana.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut ditemukan perbedaan dengan penelitian Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Terhadap Pengelolaan Potensi Wisata Air Terjun Di Desa Tompo. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata air terjun melalui beberapa tahapan pemberdayaan seperti: lokasi/wilayah, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat. Serta pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan wisata air terjun dilihat pada konsep yang ditawarkan yaitu fasilitator yakni membangun sarana dan prasarana, melakukan pemberdayaan masyarakat dan regulator yaitu aturan retribusi karcis/tiket pengunjung, aturan larangan membawa senjata tajam dan obat terlarang. Dapat dilihat adanya perbedaan dari strategi maupun konsep yang digunakan pihak pemerintah desa karena kondisi dan permasalahan yang berbeda dari tiap daerah.

Kesamaan dari penelitian ini dan kedua penelitian terdahulu adalah strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata yaitu memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang. Adapun, hambatan yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya fasilitas penunjang bagi wisatawan seperti, toilet atau kamar ganti disebabkan anggaran pemerintah desa yang terbatas.

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan dijelaskan pada pembahasan mengenai peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo, serta penjelasan teori dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata air terjun di Desa Tompo, melalui beberapa tahapan pemberdayaan yaitu: seleksi lokasi/wilayah, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat. Selain itu, selama penelitian peneliti menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu: keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan fisik.
2. Pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan wisata air terjun di Desa Tompo dapat dilihat pada konsep yang ditawarkan yaitu fasilitator yakni membangun sarana dan prasarana, melakukan pemberdayaan masyarakat dan regulator

yaitu aturan retribusi karcis/tiket pengunjung, aturan larangan membawa senjata tajam dan obat terlarang. Penulis pula menemukan kendala yang ditemukan dalam pengembangan potensi desa ini, sebagai berikut: kurangnya fasilitas objek wisata, akses jalan ke wilayah potensi wisata yang tidak mendukung, serta anggaran yang terbatas.

B. Saran

Adapun hal yang dapat disarankan kepada pemerintah Desa Tompo dalam meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pengelolaan potensi wisata Air Terjun Desa Tompo sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi wisata seharusnya lebih mengutamakan sarana dan prasarana, infrastruktur yang memadai, melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi lokal.
2. Pemerintah Desa seharusnya lebih meningkatkan keuntungan sosial, seperti mengedepankan peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata, serta memberikan pendampingan terhadap masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Jafar Sidiq Dan Risna Resnawati.2021.“Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggajati Kuningan,” Proseding KS :Risert dan PKM.
- Aprilianti, Dian. 2017 “Penilaian Potensi Objek Wisata Air Terjun Puteri Malu Kampung Jukuh Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.”.Universitas Lampung
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*Rineka Cipta.Jakarta
- Basrowi & Suwandi.2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka. Cipta*
- Edo Defrian Ramadhon. 2023 *Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa (Studi Di Desa Banjar Agung, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus).* Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung
- Eman, Ireynne Olivia. Sagay, Benny A.B, Jocom, Sherly G. 2018. Strategi Pengembangan Objek Wisata Danau Linouw Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Jurnal Ag ri-Sosio Ekonomi Vol.14 No.1 . Universitas Sam Ratulangi
- Farid, Ferdian. 2022. Peran Pemerintah Desa Senggigi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Senggigi Di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram. Mataram
- Fachruzzaman, Fachruzzaman and Irawan, Candra and Robinson, Robinson and Aprila, Nila. 2023. Modeling Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten

Lebong. Technical Report. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu.

Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, Rusli Isa, Juriko Abdussamad, Arif Bobihu, Mutia Hunaini.2023. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminstrasi dan Pelayanan Publik Vol.10 No.1. Universitas Bina Taruna Gorontalo

Hadi, Sutrisno, 2006, Analisis Regresi, Yogyakarta: Andi Offset

Husaini, Usman.2009. Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan. Bumi Aksara.Jakarta

Irwan, Efenddi. 2021 .Prospek Pengembangan Desa. CV. Fokus Media.Bandung

Iwan, Supranata.2021. "Strategi Pemerintahan Desa Tuo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Air Terjun Sigerincing Di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurei Kabupaten Marangin.

Karlana, Titis. 2022. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Laksmi, Fuad Gani dan Budiantoro. 2020. Manajemen Perkantoran Modern. Jakarta: Ghafindo Persad

Lamandasa, Richard Evans. 2013. Identifikasi Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata di Kawasan Danau Poso. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

- Maya Sajidah Salsabila dan Agus Machfud Fauzi.2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri). Jurnal Pariwisata Terapan Vol. 5., No. 1. Universitas Negeri Surabaya
- Mutmainna.2019. Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kompetensi Masyarakat (Studi Pada Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar
- Nazir. 2014. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor
- Nurfadilla.2018. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Dikabupaten Enrekang.
- Ruslan, Rosady. 2006. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi,. Konsepsi dan Aplikasi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Septi Dwi Rahayu.2019. Potensi Wisata Danau Kualomudo Di Kelurahan Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. (2016). Desain Model Prakarya dan Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Kreatif Berdimensi Industri Keunggulan Lokal. Jurnal Pendidikan
- Sri Wahyuningsih.2018. Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba.Skripsi.Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tamara Len Sukma Br Girsang. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo.2023.Skripsi. Universitas Medan Area.Medan

Wahidatun, Maghfiroh. 2019. Strategi Pengembangan Potensi Desa Suco Menjadi Produk Wisata Unggul Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Skripsi. IAIN Jember. Jember

Yana karyana, Dwi Astuti, 2023. Inovasi Pemberdayaan BUMDes Sebagai Simpul Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa. Skripsi Program Studi Administrasi Publik, Universitas Widya Mataram.